

DISERTASI

**ANALISIS KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMENGARUHI DI INDONESIA**

**POVERTY ANALYSIS AND FACTORS
INFLUENCING IN INDONESIA**

**NUR YULIANY
A013191012**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
ANALISIS KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMENGARUHI DI INDONESIA

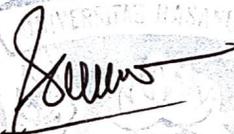
Disusun dan diajukan oleh

NUR YULIANY
A013191012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 29 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. Nursini, SE., MA
NIP 19660717 199103 2 001

Co. Promotor I



Dr. Madris, DPS, SE., M.Si
NIP 19601231 198811 1 002

Co. Promotor II



Dr. Agussalim, SE., M.Si
NIP 19670817 199103 1 006

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi



Dr. Madris, DPS, SE., M.Si
NIP 19601231 198811 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, CWM
NIP 19640205 198810 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Yuliany**

NIM : A013191012

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, disertasi yang berjudul :

ANALISIS KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Yuliany

PRAKATA

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi ini yang berjudul: "ANALISIS KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DI INDONESIA" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Aamiin.

Adapun ide gagasan yang melatarbelakangi tulisan ini karena adanya fenomena kemiskinan yang menurut penulis layak untuk dikaji dan dianalisis. Penulis ingin merekomendasikan dan menyumbangkan konsep, ide dan gagasan dari tulisan ini dengan beberapa harapan, yaitu KUR, UMP dan investasi mampu menekan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun disinilah bukti keterbatasan kemampuan Penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini sangat Penulis harapkan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya, Penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Nursini, SE., MA selaku Promotor; Dr. Madris, DPS, SE., M.Si selaku Co.Promotor 1 dan Dr. Agussalim, SE., M.Si selaku Co.Promotor 2, dengan segala ketulusan dan keihlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada Penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan.

Selanjutnya, bahwa dengan selesainya penulisan disertasi dan sekaligus selesainya program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin, tidak lepas dari berbagi bantuan, baik moril maupun materil, dorongan semangat dan doa dari semua pihak, sehingga izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terimakasih yang tulus dan ihklas, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Ekonomi UNHAS, serta seluruh Guru Besar, dan dosen Penulis pada Fakultas Ilmu Ekonomi yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas dan terutama ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan tak ternilai kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Madris, DPS, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi (KPS) Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Tim Penguji dan Penilai, baik Penguji dan Penilai internal maupun eksternal atas segala perhatian, pertanyaan, sanggahan, saran, masukan maupun kritikan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.
5. Teristimewa, ucapan terimakasih setulus-tulusnya, yang tak terhingga dan do'a terus menerus tucurahkan kepada Allah SWT, untuk semua orang tua sehingga penulis terus berjuang dan berusaha dengan berbagai pengorbanan untuk menunaikan harapan orang tua Penulis.
6. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, terkhusus angkatan 2019.1 atas dukungan dan bantuan selama menempuh pendidikan.
7. Suami tercinta yang begitu sabar dan ikhlas mendampingi serta memberikan dukungan tak terhingga kepada penulis. Teristimewa kepada anak-anakku yang selalu memberi dukungan selama menempuh pendidikan program S3 dan menemani proses pendidikan hingga selesai. Terima kasih atas kesabaran dan maaf atas waktu yang tersita.
8. Saudara saya yang selama ini membantu penulis dalam menemani setiap proses selama penulis menempuh Pendidikan.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang proses penyelesaian studi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang ilmu ekonomi di negara Indonesia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian dalam setiap aktivitas keseharian sebagai bentuk ibadah di sisih-Nya.

Aamiin...

Makassar, Juli 2022

Nur Yuliany

ABSTRAK

NUR YULIANY. Analisis Kemiskinan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi di Indonesia. (Nursini, Madris, Agussalim).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit usaha rakyat terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, 2) mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, 3) mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, 4) mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia, 5) mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa data panel, yakni data *time series* 5 tahun dan data *cross section* 34 provinsi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi terstruktur, digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, 2) berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja. Namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, 3) investasi berpengaruh terhadap kemiskinan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Namun tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja 4) pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, 5) penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : kredit usaha rakyat, upah minimum, investasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan

ABSTRACT

NUR YULIANY. *Analysis of Poverty and Its Affecting Factors in Indonesia.* (Nursini, Madris, Agussalim).

This study aims to 1) determine and analyze the effect of people's business credit on poverty, either directly or indirectly through economic growth and employment in Indonesia, 2) determine and analyze the effect of the minimum wage on poverty, either directly or indirectly through economic growth. and employment in Indonesia, 3) knowing and analyzing the effect of investment on poverty, either directly or indirectly through economic growth and employment in Indonesia, 4) knowing and analyzing the effect of economic growth on poverty, either directly or indirectly through absorption workforce in Indonesia, 5) identify and analyze the direct effect of labor absorption on poverty in Indonesia.

This study uses secondary data, in the form of panel data, namely time series data for 5 years and cross section data for 34 provinces. The analytical method used is a structured regression analysis model, used to determine and analyze the direct and indirect effects of each exogenous variable on endogenous variables.

The results of the study show that 1) people's business credit has an indirect effect on poverty through economic growth and employment. However, it does not directly affect poverty, 2) indirectly affects poverty through employment. However, it does not directly affect poverty and indirectly through economic growth, 3) investment affects poverty directly or indirectly through economic growth. However, it does not affect indirectly through employment absorption 4) economic growth indirectly affects poverty through employment absorption. However, it does not directly affect poverty, 5) employment does not directly affect poverty in Indonesia

Keywords: people's business credit, minimum wage, investment, economic growth, labor absorption, poverty

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran.....	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	16
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	17
Bab II Tinjauan Pustaka.....	18
2.1 Tinjauan Konseptual.....	18
1. Kemiskinan.....	18
2. Penyerapan Tenaga kerja.....	30
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	31
4. Kredit Usaha Rakyat.....	33
5. Upah Minimum.....	35
6. Investasi.....	38
2.2 Tinjauan Teoretis.....	40
1. Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kemiskinan.....	40
2. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan.....	43
3. KUR dengan Kemiskinan.....	50
4. Upah Minimum dengan Kemiskinan.....	52
5. Investasi dengan kemiskinan.....	55

2.3 Tinjauan Empiris	59
Bab III Kerangka Pikir Penelitian.....	60
3.1 Kerangka konseptual.....	60
3.2 Hipotesis Penelitian.....	68
Bab IV Metode Penelitian.....	70
4.1 Desain penelitian.....	70
4.2 Daerah Penelitian.....	70
4.3 Batasan variabel.....	70
4.4 Analisis Data.....	72
Bab V Hasil Penelitian.....	79
5.1 Karakteristik Kemiskinan Indonesia.....	79
5.2 Hasil Analisis Statistik.....	94
Bab VI Pembahasan Hasil Penelitian.....	100
6.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh KUR Terhadap Kemiskinan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	100
1. KUR Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan..	100
2. KUR Berpengaruh positif Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	103
3. KUR Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja.....	107
6.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	109
1. Upah Minimum Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan.....	109
2. Upah Minimum Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	112
3. Upah Minimum Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja.....	115
6.3 Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	118
1. Investasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan.....	119

2. Investasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	121
3. Investasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan melalui Penyerapan Tenaga kerja.....	124
6.4 Analisis dan Implikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia..	126
1. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan.....	127
2. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja.....	130
6.5 Analisis dan Implikasi Penyerapan Tenaga Kerja Langsung Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	133
6.6 Keterbatasan penelitian.....	135
Bab VII Kesimpulan Dan Saran.....	137
7.1 Kesimpulan.....	137
7.2 Saran.....	138
Daftar Pustaka	140
Lampiran.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase penduduk Miskin 2013-2020.....	2
Tabel 1.2	Persentase KUR Tahun berjalan Triwulan 2019-2020.....	6
Tabel 5.1	Perkembangan Garis Kemiskinan dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016-2020.....	82
Tabel 5.2	Perkembangan KUR dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016- 2020.....	83
Tabel 5.3	Perkembangan UMP dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016- 2020.....	84
Tabel 5.4	Perkembangan Investasi dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016- 2020.....	85
Tabel 5.5	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016- 2020.....	86
Tabel 5.6	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia Periode 2016- 2020.....	87
Tabel 5.7	Perkembangan KUR dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2016- 2020.....	88
Tabel 5.8	Perkembangan UMP dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2016- 2020.....	89
Tabel 5.9	Perkembangan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2016- 2020.....	90
Tabel 5.10	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2016- 2020.....	91
Tabel 5.11	Perkembangan KUR dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016- 2020.....	92
Tabel 5.12	Perkembangan UMP dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016- 2020.....	93
Tabel 5.13	Perkembangan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016- 2020.....	94
Tabel 5.14	Hasil Regresi Pengaruh Langsung.....	96
Tabel 5.15	Pengaruh Langsung dan Tidak langsung.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasai PMDM dan PMA di Indonesia.....	9
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012-2020.....	11
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	68
Gambar 4.1	Model Struktural Penelitian.....	72
Gambar 5.1	Diagram Hasil Estimasi Hubungan antar Variabel.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hubungan Variabel-Variabel Serta Hasil Penelitian Dari Peneliti Sebelumnya Yang Berkaitan
- Lampiran 2. Data Mentah
- Lampiran 3. Data Yang Diolah
- Lampiran 4. Hasil Olah Data SPSS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, namun sampai saat ini masih terdapat 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Ini diukur dari garis kemiskinan internasional US\$ 1,9 per hari. Bank Dunia mengklaim ada tiga bukti yang secara tidak langsung menunjukkan terjadinya hal tersebut di Kawasan Asia Timur dan Pasifik (Adinda Putri, 2021). Pertama, kemampuan masyarakat dalam menghadapi kerawanan pangan dan kehilangan kesempatan belajar. Kedua, perempuan lebih menderita daripada laki-laki, sebanyak 25% responden di Laos dan 83% di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Ketiga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan yang secara proporsional lebih besar daripada perusahaan-perusahaan besar.

Indonesia sebagai negara berkembang, dimana kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam pembangunan. Kemiskinan memang bukan masalah baru. Sejak bangsa Indonesia merdeka, cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat, karena kenyataan yang di hadapi adalah kemiskinan yang di derita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap pemimpin di Indonesia, selalu

menghadapi kenyataan ini sehingga kemiskinan menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia.

Kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk dengan rerata pengeluaran konsumsi per kapita setiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari, dan kebutuhan pokok bukan makanan. Menurut data BPS, secara umum pada periode 2013 sampai September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan dari sisi jumlah maupun persentase pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin 2013-2020

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Kenaikan (Persen)
2013	Maret	28,17	11,36
	September	28,60	11,40
2014	Maret	28,28	11,25
	September	27,73	10,96
2015	Maret	28,59	11,22
	September	28,51	11,13
2016	Maret	28,01	10,86
	September	27,76	10,70
2017	Maret	27,77	10,64
	September	26,58	10,12
2018	Maret	25,95	9,82
	September	25,67	9,66
2019	Maret	25,14	9,41
	September	24,79	9,22
2020	Maret	26,42	9,78
	September	27,55	10,19

Sumber : Statistik Indonesia, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada

Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Sifat kompleks masalah kemiskinan menuntut kebijakan dan strategi penanggulangan yang terintegrasi. Karena berbagai keterbatasan pemerintah, program pengentasan kemiskinan ataupun kebijakan yang berorientasi pada masalah kemiskinan membutuhkan skala prioritas. Kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Pandji Indra, 2001).

Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi: 1). Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. 3). Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2013).

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan oleh Nurkse (1953), adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Produktifitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima, yang berujung pada rendahnya

tabungan dan investasi. Rendahnya investasi menyebabkan terjadinya keterbelakangan, dan seterusnya.

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Setelah kemunculan pertama, hingga akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak.

Terhambatnya aktivitas perekonomian menyebabkan proses bisnis sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia terganggu sehingga mengakibatkan munculnya gelombang PHK masal. Jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 6-7 juta pekerja. Peluang peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia dapat memicu peningkatan jumlah penduduk miskin, selain berkurangnya pendapatan masyarakat dan kenaikan harga beberapa bahan-bahan pokok.

Hal ini membuat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 dan September 2020 meningkat. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya pemerintah adalah memberikan bantuan yang diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan kemiskinan di tanah air. Pemerintah menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu tumpuan untuk mendorong perekonomian untuk menekan angka kemiskinan.

Pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan subsidi kepada masyarakat sebagai alat pemerintah dalam rangka retribusi pendapatan untuk tujuan pemerataan, akan tetapi pada tahap implementasi, hal tersebut sangat diragukan bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih sangat jauh dari kategori sejahtera.

Sebanyak 40% pelaku usaha mandiri mengalami kemacetan usaha, atau berhenti total. Sementara 52% mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, sebanyak 35% pelaku usaha mandiri mengaku tanpa pendapatan, hingga lebih dari 50% selama pandemi.

Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, telah melalui beberapa evolusi kebijakan, khususnya skema penyalurannya. KUR yang disalurkan pada tahun 2007-

2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan skema subsidi bunga. Berikut ini data KUR yang disalurkan pada UMKM pada September 2020

Tabel 1.2 Persentase KUR Tahun berjalan Triwulan 2019-2020

Persentase	Mei 2019	September 2019	Januari 2020	Mei 2020	September 2020
KUR Super Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
KUR Mikro	65,07	64,55	64,18	64,15	67,14
KUR Kecil	34,58	35,06	35,40	35,43	31,12
KUR Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kur Penempatan TKI	0,35	0,39	0,42	0,42	0,24

Sumber : KUR Indonesia, 2021

Tabel 1.2 menunjukkan realisasi penyaluran KUR dengan persentase terbesar pada KUR Mikro dari triwulan 2 tahun 2019 sampai triwulan 3 tahun 2020 dan mengalami peningkatan. Hal ini berarti penyaluran KUR terbesar berada pada KUR Mikro dan penyaluran terkecil berada pada KUR Khusus.

Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil. Dengan adanya KUR usaha mikro dengan persentase terbesar seharusnya sudah dapat menekan angka kemiskinan, namun kenyataannya angka kemiskinan naik 10,19% seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1

KUR merupakan langkah pemerintah dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan formal kepada penduduk dewasa di Indonesia. Melalui program-program tersebut, diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata,

seperti yang dikemukakan (Saleh, 2015), (Damayanti dan Adam, 2015), (Iztihar, 2018), beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM dengan kebijakan program KUR yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Upaya lain memahami kemiskinan di Indonesia adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan produksi dapat tercermin dari kebijakan upah minimum yang memberikan kebebasan tiap daerah untuk menentukan besar UMP/UMR, sebagaimana mengacu pada ketentuan di UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, PP Pengupahan No 78 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013, upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman sekaligus perlindungan bagi buruh dalam memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada akhir 2020 ini pemerintah mengumumkan untuk tidak menaikkan kenaikan upah minimum 2021. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021, pemerintah menyarankan gubernur menetapkan upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020.

Kebijakan ini untuk melindungi dunia usaha sekaligus menjaga kelangsungan bekerja bagi para pekerja/buruh ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih. Pemerintah menilai banyak perusahaan yang terdampak pandemi dan kesulitan dalam memenuhi hak

pekerja, termasuk dalam membayar upah. Upah minimum ditinjau setiap tahun dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

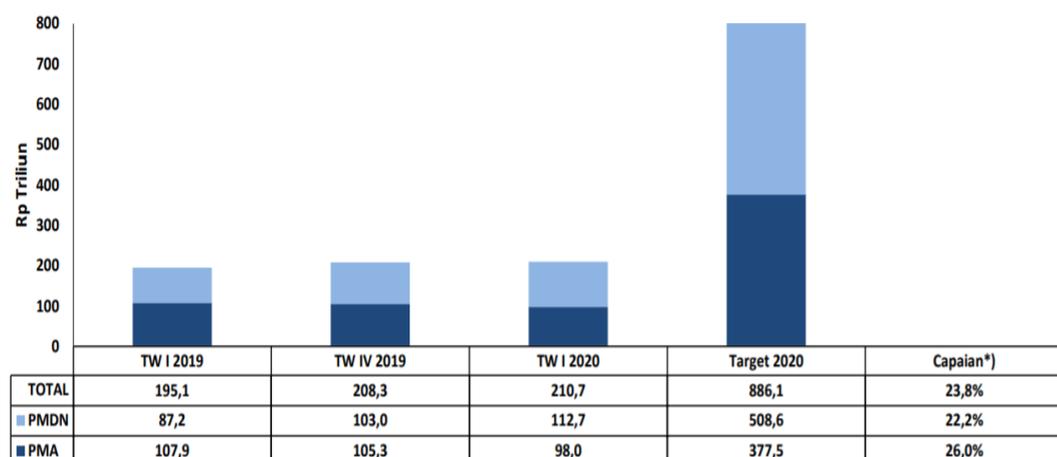
UMP adalah upah terendah yang berlaku untuk satu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Dalam menetapkan UMP, gubernur mendengarkan saran dan masukan dari dewan pengupahan provinsi. Meski tahun ini pemerintah menyarankan upah ini tidak naik, 5 provinsi di Indonesia tetap mengumumkan kenaikan, yakni Jawa Tengah 3,27%, DI Yogyakarta 3,54%, Jawa Timur 5,65%, DKI Jakarta 3,5%, dan Sulawesi Selatan 2%. Khusus DKI, akan berlaku kenaikan upah minimum asimetris, yaitu hanya perusahaan yang tidak terdampak pandemi yang diwajibkan melakukan kenaikan. Sedangkan 29 provinsi lain mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak melakukan kenaikan upah terendah ini.

Dalam beberapa studi empiris terdapat beberapa penelitian menentang kebijakan upah minimum, diantaranya adalah (Brown, 1999) menyatakan bahwa upah minimum akan menekan distribusi pendapatan, dan menghasilkan perdebatan apakah penyerapan tenaga kerja akan dihadapkan pada biaya tenaga kerja yang tinggi, pengurangan keuntungan, dan pengurangan tenaga kerja atau menaikkan harga output yang pada gilirannya memberatkan orang miskin. Hal yang senada dikemukakan oleh beberapa peneliti ((Dickens et al, 1999), (Lemos, 2004), (RK, Vedder & LE, 2001), dan (Sabia et al, 2010)).

Selain itu, rendahnya pembentukan modal masyarakat disinyalir menjadi salah satu sebab kemiskinan, kemudian modal ini diartikan sebagai investasi seperti pernyataan Nurkse yang dikutip oleh (Jhingan ML, 2012) : bahwa, “Pengalihan sebagian sumberdaya yang ada pada masyarakat untuk meningkatkan persediaan barang begitu rupa untuk perluasan output pada masa depan”, kemudian (Martin, 1990), menyatakan bahwa “perubahan modal persatuan waktu merupakan investasi”.

Efek investasi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan menjadi temuan empiris beberapa peneliti, seperti (Blanchard & Shleifer, 2001), (Bessen & Maskin, 2000), (He & Sun, 2018), (Wang et al., 2020). Diskusi investasi yang dikaitkan dengan kemiskinan, dan menghasilkan kesimpulan yang beragam (Easterly & Rebelo, 1993) dan (Agénor et al., 2008).

Fakta investasi yang terjadi di Indonesia terlihat pada gambaran perkembangan pembentukan modal di Indonesia yang dapat dilihat dari pertumbuhan investasi seperti pada gambar berikut



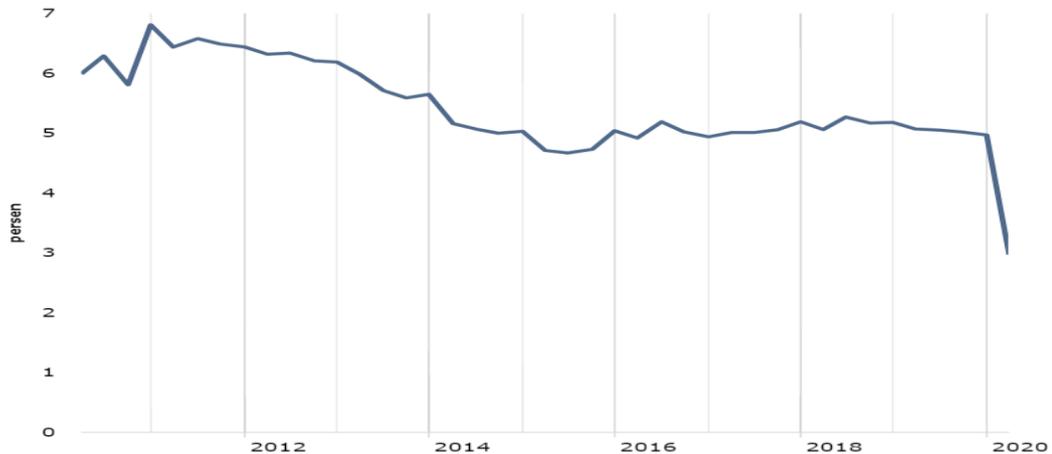
Gambar 1.1 Realisasi PMDM dan PMA di Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi investasi Indonesia Triwulan I 2020 untuk PMDN sebesar 112,7 triliun dan PMA sebesar 98 triliun. Dari gambar terlihat, PMA mengalami penurunan mulai Triwulan I 2019 sebesar 107,9 triliun, triwulan IV 2019 sebesar 105,3 triliun, sampai triwulan I 2020 sebesar 98 triliun. Tak dipungkiri, memang tak mudah mengundang investor ke Indonesia, dimana penurunan aktivitas ekonomi global menyebabkan perpindahan modal lintas wilayah semakin ketat.

Tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, dengan demikian pendapatan masyarakat juga meningkat.

Selama ini kinerja makroekonomi merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, demikian pula halnya di Indonesia. Pemerintah selalu menunjukkan kesuksesan pembangunannya dengan mengemukakan capaian kinerja makro ekonomi yang bagus, namun sisi lain, capaian indikator mikro yang terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro ekonomi yang dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi stabil, kesempatan kerja luas dan kemiskinan semakin menurun. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012-2020

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar 1.2 ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dimana Indonesia sudah berada pada ambang resesi ekonomi akibat pandemi. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan dari program restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak penundaan ekspansi moneter pada tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Karisma & Soejoto, 2010) . Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian (Teddy Christianto, 2013) dan (Pratama, 2014).

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu masalah utama dalam pembangunan Indonesia, baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Ledakan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara lapangan kerja untuk menampung mereka tidak memadai.

Adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Banyak tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak menurut Lewis. Sedangkan Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2020 sebesar 7,07%, naik dari Februari 2020 yang sebesar 4,99%. Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat enam provinsi yang memiliki TPT di atas angka nasional. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan TPT tertinggi yang angkanya melampaui satu digit, yaitu sebesar 10,95%. Provinsi selanjutnya yang mencetak TPT di atas nasional adalah Banten sebesar 10,64%, Jawa Barat 10,46%, dan Kepulauan Riau 10,34%. Lalu Maluku sebesar 7,57% dan Sulawesi Utara 7,37%.

Permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya sekedar jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia atau rendahnya produktivitas, tetapi jauh lebih serius, yaitu kegagalan pada penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output yang dihasilkan (Todaro, 2006). Sehingga pemerintah menanggapi dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dirasa tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja dan pengangguran yang ada di Indonesia

Sebenarnya tidak ada masalah dengan jumlah angkatan kerja yang banyak. Hanya saja, jumlah perusahaan di Indonesia tidak terlalu banyak dan daya serap mereka pun juga sedikit. Padahal, pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring angkatan-angkatan kerja yang banyak serta berpotensi menjadi tenaga kerja. Bila hal ini tidak diatasi, angka pengangguran akan terus bertambah dan mengakibatkan pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan.

Penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan produktif harus dilaksanakan dengan meluaskan landasan kegiatan ekonomi. Salah satu faktor yang menghambat produksi di daerah-daerah dan menekan tingkat tingkat hidup golongan berpendapatan rendah ialah produktivitas yang rendah. Eksternalitas negatif dari peningkatan produktivitas seharusnya juga perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat mengurangi

pendayagunaan tenaga kerja yang tidak membawa perluasan lapangan kerja produktif dan hanya mempertajam masalah pengangguran. Konsekuensinya adalah pertumbuhan ekonomi melampaui perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan lapangan kerja produktif. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua daerah, namun intensitas masalah itu mungkin sekali berbeda karena adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyerapan tenaga kerja itu timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja (Wartaman, 2003), (Munthe, 2017),

Jadi menarik untuk melihat pengaruh kebijakan KUR, upah minimum, dan investasi dalam suatu provinsi terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia dan juga melihat apakah ada dukungan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah KUR berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

2. Apakah upah minimum berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Apakah investasi berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
5. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung pada kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar atas permasalahan penelitian yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah KUR berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah upah minimum berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah investasi berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung pada kemiskinan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan KUR, upah minimum, dan investasi untuk mengentaskan kemiskinan di masa depan.
2. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan kerangka konseptual, khususnya pada penelitian kemiskinan yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup kaidah penelitian secara umum. Ruang lingkup objek penelitian meliputi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, KUR, upah minimum, dan investasi yang berhubungan dengan kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di daerah itu, individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian daerah tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten atau dengan istilah yang lebih umum di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan menurut World Bank merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya

Pada awalnya kemiskinan dipahami sebagai pendapatan yang rendah dan gagal memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini berkembang pada tahun 60-an yang terlihat dari penggunaan indikator ekonomi makro untuk mengukur pendapatan (PDB per kapita). Konsep kemiskinan kemudian berkembang lebih luas pada aspek kesejahteraan manusia. Pengukuran konsep kemiskinan juga berkembang dengan memasukkan pendidikan dasar, kesehatan dasar dan akses terhadap layanan sosial sebagai tambahan dari ukuran pendapatan (Brock & Turnovsky, 1981).

Kemiskinan menjadi sebuah hubungan sebab akibat dan terdapatnya hubungan kausalitas yang membentuk sebuah lingkaran paradigma kemiskinan. Lingkaran paradigma kemiskinan ini menggambarkan bahwa kemiskinan disebabkan karena kemiskinan itu sendiri "*The Vicious Circle of Poverty*".

Lingkaran paradigma kemiskinan merupakan gambaran hubungan kausalitas yang tak terbatas sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut; pendapatan masyarakat domestik yang rendah dikarenakan produktivitas yang rendah mengakibatkan semakin meningkatnya kemiskinan, kemiskinan yang semakin meningkat menyebabkan tingkat tabungan

domestik menjadi rendah, rendahnya tingkat tabungan domestik akan menyebabkan tingkat investasi domestik menjadi rendah, modal domestik yang mengalir menjadi rendah dalam suatu daerah mengakibatkan dalam suatu daerah kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan penurunan pada tingkat produktivitas domestik menjadi rendah, produktivitas domestik yang rendah mengakibatkan pendapatan domestik menjadi rendah, begitu pula seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran paradigma kemiskinan.

Nurkse mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*), kemiskinan dalam suatu negara tidak memiliki ujung pangkal, artinya negara miskin itu karena tidak memiliki apa-apa, dan dengan tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara menderita kemiskinan (Kuncoro, 2004).

Menurut (Cambers, 1983), kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2) ketidakberdayaan, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan, dan 5) keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan juga menjadi ukuran kesejahteraan, baik secara ordinal maupun cardinal (Sen, 1976a). Kemudian (Sen, 1999), memperkenalkan konsep kemiskinan yang lebih kompleks, dengan melakukan pendekatan yang lebih kompleks yaitu *basic capability* dalam definisi kemiskinan. Konsep kemiskinan terus berkembang mulai dari pendekatan *utility* hingga

kemiskinan didefinisikan sebagai hilangnya pendapatan, makanan, tempat tinggal, kesempatan kerja, aspek fisik, dan sumber produktif. Kemiskinan juga dinyatakan sebagai ketidakmampuan terhadap akses air minum bersih, fasilitas kesehatan, hingga pada resiko dalam hidup, ketidakpastian dengan masa depan, hilangnya hak suara.

Teori kemiskinan yang berangkat dari paradigma neo-liberal melakukan pendekatan pada kebebasan individu dan melihat kemiskinan sebagai persoalan struktural. Paradigma neo-liberal bersumber dari karya klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill, yang menyerukan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam masyarakat, kemudian Adam Smith melalui karyanya "*The Wealth Nation*" (1776), merupakan penggagas azas Laissez Fiaire dalam ekonomi dan dilanjutkan oleh Frederick Hayek dalam karyanya *The Road to Serfdom* (1945), menjadikannya sebagai rujukan oleh kaum neo-liberal yang mengedepankan azas Laissez Fiaire. (Cheyne, Christine., 1998), menyebut kaum ide neo-liberal sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan mengusulkan "*The Almost Complete Absence of State's Intervention in The Economy*".

Pendekatan neo-liberal memiliki kelemahan yaitu memandang kemiskinan sebagai persoalan individu dan pokok persoalan hanya pada permasalahan pendapatan, sehingga orang miskin hanya dijadikan tujuan dari program, dan kurang bahkan tidak dilibatkan dalam permasalahan kemiskinan itu sendiri, akibatnya bentuk-bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial tidak menjadi perhatian paradigma ini,

meskipun demikian kemiskinan dengan paradigma neo-liberal lebih mudah terbaca dan terukur serta manfaat program-program perbaikan lebih mudah dirasakan oleh masyarakat miskin.

Paradigma demokrasi sosial menjadikan persoalan struktural sebagai fokus utama penyebab kemiskinan dan bukan persoalan individual, dimana paradigma ini menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dan tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap sumber-sumber kemasyarakatan.

Pendukung demokrasi sosial, yang digagas oleh Karl Marx dan Frederick Engel, mengkritik kaum neo-liberal dengan menyatakan bahwa pasar bebas tidaklah meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi lebih pada peningkatan kemiskinan dan eksploitasi, namun demikian tidak dengan serta merta menghapuskan pandangan kapitalis karena masih memandang sistem ini sebagai sistem ekonomi yang efektif (Cheyne, Christine., 1998)

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan di sini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana

mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga peran negara sangat penting dalam merumuskan strategi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan, padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Pada dasarnya tidak semua kemiskinan berarti bahwa orang atau kelompok yang dianggap miskin merupakan orang yang paling menderita di permukaan bumi. Kemiskinan kemudian dibagi dalam beberapa jenis, (Badaruddin, 2012), yaitu;

Pertama, Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, Kemiskinan absolut adalah kondisi yang ditentukan berdasar atas ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

Ketiga, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan dan menyebabkan kemiskinan serta melanggengkan kemiskinan dalam masyarakat. Keempat, kemiskinan kultural adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu dan tetap melekat dekat dengan indikator kemiskinan.

Jika melihat dari sebab kemiskinan, (Kuncoro, 2004) menyebut bahwa; 1) Kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; 2) Adanya perbedaan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki produktivitas rendah, maka perolehan yang didapat juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya ini biasanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan; 3) Kemiskinan karena adanya perbedaan akses terhadap modal. Ketiga sebab ini menjadi sebab dari lahirnya konsep lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh praktek pemerintah yang korup, rendahnya penegakan hukum dan akuntabilitas pemerintah

menjadi bahan kondisi sosial menciptakan kemiskinan. Perilaku korupsi memiliki efek tidak langsung kemiskinan, karena korupsi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam pembangunan khususnya program-program penanggulangan kemiskinan. Kerusakan kondisi sosial dan manusia menjadi sumber utama kemiskinan (Triesman, 2002).

(Sen, 1997) menyatakan bahwa jika pendekatan menggunakan fungsi kesejahteraan sosial, akan sangat membantu mengukur atau mengevaluasi ukuran-ukuran ketimpangan relatif, kemudian kerangka kerja diperluas termasuk membandingkan satu orang dengan yang lainnya. Sen kemudian menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

(Jantti et al, 2012), menggunakan garis kemiskinan untuk menilai konsumsi sebagai fungsi dari utility dalam aksioma yang dibangun oleh (Sen, 1976b). Aksioma Sen diantaranya adalah; 1). ukuran kemiskinan yang baik seharusnya tidak dipengaruhi oleh informasi yang berkaitan dengan pendapatan penduduk yang tidak miskin; 2) ukuran kemiskinan yang baik seharusnya meningkat jika pendapatan dari penduduk miskin berkurang. Ini berarti ada korelasi antara indeks kemiskinan dengan jarak penduduk miskin dari garis kemiskinan; 3) adanya transfer pendapatan antar penduduk miskin seharusnya mengurangi besarnya indeks. Ini berarti bahwa ukuran kemiskinan yang baik harus merefleksikan bagaimana pendapatan terdistribusi di antara penduduk miskin; 4) jika indeks kemiskinan salah satu bagian dari populasi meningkat sedangkan

indeks untuk bagian populasi lainnya konstan, maka indeks kemiskinan untuk keseluruhan populasi seharusnya meningkat.

Indikator kemiskinan digunakan untuk dijadikan ukuran kemiskinan atau menentukan garis kemiskinan yang berpatokan kepada (Foster et al, 1984), antara lain:

Headcount Index (P0) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indeks kemiskinan ini yang paling luas penggunaannya, dimana secara sederhana merupakan proporsi penduduk yang tergolong miskin dari keseluruhan populasi. Kelebihan utama dari *headcount index* ini adalah mudah dihitung dan mudah diinterpretasi, meskipun indeks ini memiliki beberapa kelemahan. Indeks ini tidak dapat menjelaskan kedalaman kemiskinan yaitu seberapa miskin penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempertimbangkan sama sekali aspek distribusi pendapatan penduduk miskin. Estimasi *headcount index* harus dilakukan berdasarkan data individu bukan data rumah tangga, padahal hampir seluruh data survei untuk menghitung kemiskinan berbasiskan rumah tangga.

Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini mengukur tingkat kedalaman kemiskinan di suatu wilayah relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks ini merupakan rata-rata proporsi *poverty gap index* terhadap garis kemiskinan, dimana untuk penduduk tidak miskin nilai *poverty gap index* adalah nol. Karena

poverty gap index merupakan jarak antara pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menghilangkan kemiskinan, secara sederhana besarnya biaya yang harus diberikan kepada penduduk miskin adalah sebesar jumlah dari *poverty gap index*.

Poverty Severity Index (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini mengukur tingkat keparahan kemiskinan yaitu merupakan indeks tertimbang dari *poverty gap index* dengan angka tertimbangya adalah *poverty gap* itu sendiri. Dalam praktek, indeks ini jarang digunakan karena lebih sulit untuk diinterpretasi.

F-G-T Index, Ketiga macam indeks kemiskinan yang telah diuraikan di atas yaitu *headcount index*, *poverty gap index* dan *poverty severity index* merupakan keluarga indeks yang dikenal dengan nama *F-G-T index* sehingga dapat dituliskan dalam bentuk rumusan yang sama. *F-G-T index* ini mempunyai sifat *strictly decreasing* terhadap standar hidup penduduk miskin, yaitu semakin rendah standar hidup yang dimiliki maka akan semakin rendah nilai indeks ini atau semakin miskin penduduk tersebut (Foster et al, 1984).

Penelitian ini mengambil jalan dengan mendefinisikan kemiskinan dengan mengambil ukuran garis kemiskinan, dimana secara sederhana

merupakan proporsi penduduk yang tergolong miskin dari keseluruhan populasi, yaitu *Headcount Index (P0)*.

Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia memang begitu beragam. Kemiskinan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Indonesia masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan.

Nurkse (Sukirno, 2013) menyatakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketidakadaan pembangunan masa lalu tetapi juga menimbulkan hambatan pembangunan dimasa yang akan datang. Menurut pandangan Nurkse terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat antara lain: dari segi penawaran modal, dan dari segi permintaan modal.

Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci atau membatasi (Ravallion dan Galasso, 2005).

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan

evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (Bank Dunia, 2002).

Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor-faktor mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tambunan, 2001).

(The World Bank, 2006), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi; (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan

lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik; (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja di berbagai sektor dan lapangan usaha disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Mudrajad, 2002).

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Konadi, 2014).

Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh

para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja (Sekigawa, 2012).

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi yang lain seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan faktor penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menerangkan prestasi perkembangan ekonomi suatu negara/ daerah dari periode ke periode berikutnya. Menurut (Sukirno, 2013), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Teori pertumbuhan neo klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan total output berhubungan dengan pertumbuhan dalam input, seperti

tenaga kerja, modal dan perbaikan dalam teknologi (Dornbusch, Rudiger., 2004). Hal inilah yang diduga menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara berbeda-beda.

Menurut (Todaro, 2011), Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara atautkah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB atautkah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam (Mankiw, 2003). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output

tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi, baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya, digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar acuan yang ada, digunakan untuk melihat pola pertumbuhan dari tahun ke tahun.

4. Kredit Usaha Rakyat

Pengeluaran negara dapat dikelompokkan ke dalam pengeluaran negara untuk pembelian barang dan jasa (yang sifatnya *exhaustive*) dan subsidi (*government transfer payment*). Pengeluaran negara untuk pembelian barang dan jasa lebih merupakan alat kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi, sedangkan subsidi merupakan alat pemerintah dalam rangka retribusi pendapatan (Nurdjaman, 1992).

Erwan (Munawar, 2013) yang menjelaskan lebih jauh bahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum.

Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain: 1) Penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang; 2) Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang; 3) Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Disamping hal tersebut, semua bentuk *income* dan *price support* juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan

KUR merupakan salah satu program kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Salah satu manfaat dari KUR yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM adalah kemudahan dalam mengakses bank. KUR secara teknis memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap perbankan.

Menurut (Putra, 2013), KUR adalah suatu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga yaitu: Kredit jangka

pendek; berjangka waktu satu tahun. Kredit jangka menengah; berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jangka Panjang; berjangka waktu lebih dari tiga tahun (Ulfa & Mulyadi, 2020),

Pada awal pelaksanaan Program KUR merupakan bagian kebijakan yang pro terhadap kemiskinan (*pro poor*), dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Dalam perjalanan program ini, mengalami berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berbagai perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek kebijakan yang bersifat mendasar meliputi perubahan skema penyaluran KUR, perluasan cakupan penerima program KUR, perluasan lembaga penyalur Program KUR. Upaya perluasan juga dilakukan dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan berbagai fasilitasi dalam upaya optimalisasi penyaluran KUR (Aristanto E, 2019).

5. Upah Minimum

Pembahasan mengenai upah minimum tidak lepas dari teori dasar dari upah itu sendiri yang dinyatakan oleh Oleh John Stuart Mill (1806-1873) seorang berkebangsaan Inggris dan juga penganut mazhab klasik yang menyajikan pembahasan pemikiran Adam Smith, Ricardo dan Malthus dalam bukunya "*Principles of Political Economy*" (1848) menyatakan bahwa upah tidak dapat naik kecuali jika terjadi peningkatan dana agregat yang digunakan untuk membayar buruh, dan upah sangat tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Mill juga

percaya bahwa pemerintah tidak seharusnya campur tangan dalam urusan kegiatan ekonomi. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah (*wage funds*) untuk pembayaran upah, yang mana pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu jadi tingkat upah tidak berubah jauh dari alokasi tersebut. Maka dari kedua teori tersebut di atas ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan selalu tertekan pada tingkat yang rendah.

Neo-klasik yang masih sepaham dengan klasik bahwa kebebasan berusaha adalah hal yang sangat penting namun terdapat perbedaan dalam sikap yang meninggalkan pesimisme klasik tentang upah. Mazhab ini mengajukan usulan bahwa tingkat upah dapat saja tinggi asal sesuai dengan *marginal product*-nya, maka tingkat upah cenderung sama dengan nilai pasar dari *marginal product* sehingga pada tingkat mikro tenaga kerja tidak homogen dengan kata lain bahwa setiap tenaga kerja terdapat satu tingkat *marginal product* dan satu tingkat upah (Koutsoyiannis A, 1982).

Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor-faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut atau tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha tersebut. Ini berarti pengusaha mempekerjakan sejumlah

karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima oleh orang tersebut (Hirshleifer, 1984).

Jadi selama nilai pertambahan hasil marginal karyawan lebih besar dari upah yang dibayarkan oleh pengusaha, maka pengusaha masih dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak pengusaha tentu tidak bersedia membayar pekerja lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha. Dilihat dari segi pekerja, karyawan tersebut tidak bersedia menerima upah lebih rendah dari nilai usaha kerjanya. Bila pengusaha membayar pekerja lebih rendah dari usaha kerjanya maka pekerja berhenti dan mencari pekerjaan di tempat lain yang mampu membayar sama dengan usaha kerjanya, dengan asumsi adanya mobilisasi sempurna, karyawan akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil marginalnya (Simanjuntak, 2001).

Meskipun terdapat persilangan pendapat mengenai campur tangan pemerintah dalam ekonomi, namun dalam persoalan upah pekerja dalam banyak kasus di berbagai negara, peran pemerintah cukup besar, terlihat dari adanya penetapan upah minimum dengan pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan bagi pekerja sehingga diharapkan dengan penetapan upah minimum ini mampu mensejahterakan pekerja.

6. Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan".

Menurut (Boediono, 1982), investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, (Mankiw, 2003). Definisi ini juga digunakan oleh Keynes.

(G. Mankiw, 2012), kemudian membagi tiga jenis investasi, yaitu: 1) Investasi tetap bisnis, merupakan bagian terbesar pengeluaran investasi yaitu pembelian pabrik dan pembelian peralatan baru perusahaan, yang kemudian dikenal dengan model investasi neo-klasik. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya untuk perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model menunjukkan bagaimana tingkat investasi, selain stok modal yang terkait dengan marjinal produk modal, tingkat bunga, dan

peraturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. 2) investasi residensial (perumahan), Investasi perumahan meningkat seiring dengan meningkatnya harga perumahan. Harga relatif perumahan menentukan penawaran rumah baru, sehingga biaya membangun rumah bergantung pada harga keseluruhan. Model investasi rumah pada dasarnya sama dengan model investasi tetap neo-klasik. 3) Investasi persediaan; Investasi persediaan adalah barang-barang yang disimpan di gudang oleh perusahaan dan pada masa krisis perusahaan menghentikan menambah persediaan begitu barang terjual, sehingga investasi perusahaan menjadi negatif. Salah satu kegunaan persediaan adalah memperlancar tingkat produksi sepanjang waktu. Ketika penjualan rendah produksi menjadi lebih banyak dan kelebihan barang menjadi persediaan, ketika penjualan tinggi, produksi menjadi lebih sedikit dan menjual persediaan. Motif ini disebut motif pelancaran produksi. Alasan lain perusahaan melakukan investasi persediaan adalah membuat perusahaan beroperasi lebih efisien, serta menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Model yang dibangun berdasarkan investasi persediaan berbeda dengan model neo-klasik, yang disebut dengan model percepatan. Model ini berangkat dari asumsi bahwa perusahaan menyimpan persediaan yang proporsional terhadap tingkat output perusahaan sehingga investasi persediaan proporsional terhadap perubahan dalam output.

Nopirin (2011), pengertian investasi mencakup investasi barang-barang tetap pada perusahaan (*business fixed investment*), persediaan

(*inventory*) serta perumahan (*residential*). Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi juga mempunyai peranan penting dalam permintaan agregat. Pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) capital dan investasi akan menambah jumlah dari capital.

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi, (N. G. Mankiw, 2006). (Kuncoro, 2013) menambahkan bahwa persediaan modal fisik yang besar sebagai hasil dari rasio investasi yang tinggi akan membawa pada PDRB yang tinggi. Investasi yang tinggi juga cenderung membawa pada pendapatan yang tinggi.

2.2 Tinjauan Teoretis

1. Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kemiskinan

Permintaan tenaga kerja adalah permintaan terhadap input. Permintaan ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa (komoditi). Konsumen membeli suatu komoditi karena komoditi

tersebut akan memberikan kegunaan atau kepuasan baginya, akan tetapi bagi pengusaha, mempekerjakan seorang pekerja bertujuan untuk membantu memproduksi barang atau jasa (komoditi) untuk dijual kepada konsumen dan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja sangat tergantung dari pertambahan permintaan konsumen akan barang yang akan diproduksinya. Oleh sebab itu, permintaan terhadap tenaga kerja disebut sebagai permintaan terkait (*derived demand*).

Dengan memperhatikan tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor upah untuk menggunakan tenaga kerja. Faktor lain yang juga diperhatikan adalah: (1) bagaimana tingkat tambahan hasil (*marginal product*), yaitu output yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja; (2) bagaimana penerimaan marginal (*marginal revenue product*), yaitu jumlah uang yang diterima pengusaha dengan tambahan hasil dari penjualan tambahan output-nya; dan (3) bagaimana biaya marginal (*marginal cost*), yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan menambah tenaga kerja dibandingkan dengan tambahan pendapatannya (*marginal revenue product*).

Jika penerimaan marginal akibat penambahan produk dari penambahan tenaga kerja (*marginal revenue product*) ini lebih besar dari tambahan biaya (*marginal cost*), maka akan menambah keuntungan perusahaan. Dengan demikian, penambahan tenaga kerja akan lebih baik untuk dilakukan.

Permintaan terhadap tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas dengan dua input variabel. Dengan proses derivasi dan transformasi untuk permintaan tenaga kerja (Elfindri, & Bachtiar, 2004).

Menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Banyak tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak. Menurut Keynes, berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak berkerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labour union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah.

Reaksi pertumbuhan penduduk karena adanya peningkatan permintaan tenaga kerja memerlukan waktu. Jika permintaan tumbuh dengan cepat maka tingkat upah akan bertahan pada tingkat yang tinggi, atau untuk beberapa waktu justru akan meningkat. Sebaliknya jika permintaan tumbuh lebih lambat dari pada pertumbuhan penduduk maka tingkat upah akan merosot, karena itu laju pertumbuhan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan output. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap

sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (Darini, 2009).

Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian jumlah penduduk akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi dengan pengertian bahwa tenaga kerja merupakan sumberdaya untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar penjualan output. Oleh sebab itu maka, kebutuhan tenaga kerja tergantung dari penyerapan tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian. Sejalan dengan hal ini, (Widodo, 2011), mengatakan juga bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dimana jika laju pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi maka akan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan menekan angka kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja itu timbul karena adanya usaha untuk memperluas penyerapan tenaga kerja yang ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan penyerapan tenaga kerja. Strategi pembangunan dan sasaran tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja, orientasi untuk peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) harus terlebih dahulu diikuti oleh peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan dan ketrampilan yang memadai agar dalam pembangunan tersebut peningkatan GDP juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja (Effendi, 2014).

Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

2. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Merujuk pada beberapa kriteria kesejahteraan, oleh Adam Smith yang mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial, karena pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari pertumbuhan tenaga kerja dan ketersediaan barang konsumsi bagi masyarakat, jadi kesejahteraan sosial dekat pada kesejahteraan yang tercapai pada saat ekuilibrium, kemudian oleh Pareto menyatakan bahwa kesejahteraan tercapai pada saat kondisi efisien yang kemudian dikenal dengan istilah *Pareto Optimum* (Koutsoyiannis A, 1982).

Pertumbuhan ekonomi, bagi kaum klasik merupakan syarat tercapainya kesejahteraan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam Smith (1776). Pertumbuhan ini kemudian menjadi perdebatan yang panjang dan masih terjadi hingga saat ini, yang kemudian digunakan oleh penganut konsep kemiskinan neo-liberal dengan menggunakan pendapatan perkapita sebagai ukuran, selanjutnya oleh BPSRI

menggunakan pengeluaran per kapita per bulan dalam menetapkan garis kemiskinan.

Model awal pertumbuhan yang digagas kaum neo-klasik yang dipelopori oleh Solow (*Solow Growth Model*) dimana model ini menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu, (Mankiw, 2003). Model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang bergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja, kemudian diasumsikan memiliki pengembalian skala konstan, sehingga tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja, jika ukuran perekonomian diukur oleh jumlah pekerja.

Permintaan barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi, sehingga output terbagi dalam konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja, dan jika sebagian pendapatan ditabung maka investasi sama dengan tabungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Anggapan ini bersifat sementara, karena jika semua pendapatan ditabung, artinya tingkat tabungan adalah 100% maka sudah barang tentu tidak ada yang di konsumsi, sehingga perlu dilihat akumulasi modal yang optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi.

(Mankiw, 2003). Kemudian menyatakan bahwa "Tujuan pembuatan kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang

membentuk masyarakat. Mereka tidak peduli dengan jumlah modal dan bahkan pada jumlah output, tapi hanya peduli berapa besar jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi, sehingga pembuat kebijakan memilih perekonomian pada kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi”.

Hal lain yang menjadi ciri model pertumbuhan Solow adalah memasukkan variabel baru yaitu variabel efisiensi tenaga kerja, yang mewakili kemajuan teknologi yang mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, sehingga ketika teknologi mengalami kemajuan maka efisiensi tenaga kerja meningkat. Kemajuan teknologi yang mampu menjelaskan peningkatan standar kehidupan berkelanjutan. Pertanyaannya adalah dari mana asal kemajuan teknologi, karena dalam model Solow, kemajuan teknologi hanya diasumsikan. dan pada jangka panjang kemajuan teknologi di luar dari sistem ekonomi.

Model pertumbuhan lain adalah Teori pertumbuhan endogen yang menolak asumsi model Solow (1956) dan Swan (1956) mengenai perubahan teknologi sebagai variabel eksogen, dan menganggap model Solow tidak mampu menjelaskan pertumbuhan jangka panjang karena menganggap keseimbangan jangka panjang *capital-labor ratio* akan menghasilkan pertumbuhan mendekati nol. Model pertumbuhan endogen dipelopori oleh (Romer, 1986) dan (Lucas, R E., 1988).

Model pertumbuhan endogen berasumsi pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Jadi setiap industri memproduksi dengan skala hasil yang konstan. Romer berasumsi seperti asumsi klasik bahwa cadangan modal dapat mempengaruhi output pada tingkat industri,

sehingga memungkinkan terjadinya skala hasil yang terus meningkat di tingkat perekonomian secara keseluruhan. Cadangan modal ditingkat perusahaan termasuk didalamnya adalah ilmu pengetahuan merupakan barang publik dan tidak wajar mengasumsikan ilmu pengetahuan memiliki pengembalian skala menurun (Mankiw, 2003).

Salah satu permasalahan model Solow (Mankiw, Romer dan Weil, 1992) adalah kurang bervariasinya standar hidup internasional jika dibanding dengan model endogenous, sehingga dalam model pertumbuhan endogen mengambil *human capital* sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, karena ekonomi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill untuk mengadopsi teknologi.

Model yang dibangun Romer adalah cara memahami model yang dibangun oleh Harold Domar, yaitu pertumbuhan bergantung pada investasi, namun yang menjadi kelemahan model pertumbuhan endogen adalah model ini lebih menekankan pada pertumbuhan jangka panjang sehingga pertumbuhan jangka pendek dan menengah terabaikan. Maka dari itu, model pertumbuhan endogen agak kurang cocok dengan negara-negara berkembang, dimana hambatan pertumbuhan lebih pada persoalan struktur (Mankiw, 2003).

Salah seorang pendukung teori pertumbuhan endogenous yaitu (Barro & Martin, 1995) banyak dipengaruhi oleh Barro merupakan pendukung liberalisasi ekonomi. Hasil-hasil karya Martin memperlihatkan bahwa dia juga tetap dalam pengaruh neo-classic. Dalam *Economic Growth* (1995), Barro dan Sala-i-Martin mengembangkan model

pertumbuhan Ramsey (1928), yang dikemukakan kembali oleh Cass (1965) and Koopmans (1965). Model Ramsey pada dasarnya adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dengan menggunakan fungsi *utility* rumah tangga, kemudian memodifikasi Model Solow dan Model Swan. Model ini kemudian oleh (Martin, 1990) memasukkan unsur pemerintah sebagai agregat belanja pemerintah.

Teori pertumbuhan yang dibangun dalam hubungannya dengan belanja publik terlihat pada karyanya yang berjudul *Public Finance In Models of Economic Growth* (1990). Teori ini berangkat dari teori utilitas rumah tangga yang memegang aset riil dalam bentuk modal fisik dan modal manusia yang akan habis menurut waktu. Model yang kemudian dibangun berangkat dari model pertumbuhan *endogenous*, dimana produsen akan meminjam pada tingkat suku bunga dengan dasar memaksimalkan penerimaan nilai bersih sekarang (*net present value revenue*). Individu termasuk produsen kemudian menerima barang publik (*non-exclusive*) yang nilainya sebesar belanja pemerintah (*government expenditure*) yang terbagi merata pada seluruh produsen. Model ini tetap menggunakan fungsi produksi *cobb-douglas*.

(Barro & Martin, 1995), menyatakan bahwa modal terdiri atas semua input yang berbentuk fisik, seperti mesin, bangunan, jalan dan komputer. Barang-barang ini digunakan untuk produksi dan tidak untuk dikonsumsi serta digunakan untuk kegiatan produksi berikutnya. Barang-barang ini diinvestasikan oleh pihak swasta dan juga oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur jalan, bangunan, listrik, pengairan dan lainnya.

Modal yang berasal dari pemerintah, yang dikenal dengan barang publik tidak dimasukkan dalam persamaan *cobb-dougllass* dari model *neo-classic*. (Mankiw, Romer dan Weil, 1992) kemudian memasukkan modal manusia (*human capital*) sebagai modal non fisik. Sala-i-Martin juga mengembangkan teori pertumbuhan yang lebih fokus pada distribusi pendapatan dunia, dan menggunakan derajat kemiskinan sebagai ukuran ketimpangan (Pinkovskiy & Martin, 2009).

Untuk mendukung penggunaan variabel eksogen, dalam model kemiskinan, yang merupakan fungsi dari pertumbuhan, maka peneliti mengacu pada model yang dibangun oleh (Martin, 1990), yang memungkinkan menggunakan variabel kebijakan pemerintah dalam teori pertumbuhan endogen dimasukkannya variabel kebijakan pemerintah pada manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, dalam menanggulangi kemiskinan menurut konsep kemiskinan demokrasi sosial

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Son & Kakwani, 2004); (Bourguignon, 2004) juga memberikan kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiw, dimana setelah melakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat ketimpangan

sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim, 2009).

(Adams, 2004) juga melihat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pendapatan rata-rata. Terdapat hubungan yang kuat secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

3. KUR dengan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. (Hasibuan, 2005), menegaskan peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan guna membuat program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang ditemukan oleh Hasibuan diperkuat oleh (Alawi, 2006). Alawi menemukan bahwa alokasi anggaran untuk

program pemberdayaan masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat maka akan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan.

(Todaro, 2011) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan social.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga yaitu: Kredit jangka pendek; berjangka waktu satu tahun. Kredit jangka menengah; berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jangka Panjang; berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis kredit dari sudut jaminan dibagi 2 (dua): Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Dalam perkembangan tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa agunan, namun dalam beberapa terakhir ini muncul suatu kredit tanpa agunan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan (Sukarjono dan Purnomo, 2014).

Pada awal pelaksanaan Program KUR merupakan bagian kebijakan yang pro terhadap kemiskinan (*pro poor*), dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Dalam perjalanan program ini, mengalami berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berbagai perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek kebijakan yang bersifat mendasar meliputi perubahan skema penyaluran KUR, perluasan cakupan penerima program KUR, perluasan lembaga penyalur Program KUR. Upaya perluasan juga dilakukan dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan berbagai fasilitasi dalam upaya optimalisasi penyaluran KUR (Aristanto E, 2019). Berbagai upaya tersebut, tentunya mengakibatkan perubahan dan dinamika dalam proses penyaluran Program KUR.

4. Upah Minimum dengan Kemiskinan

Indonesia sebagai negara dengan angkatan kerja yang sangat besar, juga menerapkan upah minimum dan memiliki kekuatan hukum undang-undang, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, dan pada bagian tentang pengupahan menyatakan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Pada pasal lain dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 ini menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kemudian masih dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa, upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota.

Salah satu pertimbangan sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan upah minimum yang tercakup dalam undang-undang adalah peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika melihat beberapa studi empiris yang menghubungkan upah minimum dengan kesejahteraan seperti (Golan A, 2001) menemukan peningkatan dalam upah minimum mengakibatkan peningkatan hilangnya kesejahteraan, di samping itu ditemukan juga bahwa upah minimum mengurangi keadilan bagi orang yang berpendidikan tinggi dan rendah. Sebelumnya (Brown, 1999) menyatakan bahwa upah minimum akan menekan distribusi pendapatan, dan menghasilkan perdebatan apakah penyerapan tenaga kerja akan dihadapkan pada biaya tenaga kerja yang

tinggi, pengurangan keuntungan, dan pengurangan tenaga kerja atau menaikkan harga output.

(Dickens et al, 1999), menyatakan bahwa upah minimum akan menekan secara signifikan distribusi pendapatan tetapi tidak memiliki efek negatif terhadap tenaga kerja, karena harga-harga mengalami kenaikan, sehingga lebih memberatkan orang miskin dari pada menolong orang miskin (Lemos, 2004). Sebelumnya (RK, Vedder & LE, 2001) menemukan bahwa tidak ada bukti nyata upah minimum dapat mengurangi kemiskinan. Bahkan tidak mengurangi tingkat kemiskinan pada kaum pekerja (Sabia et al, 2010).

(Doucouliagos and Stanley, 2009), menemukan bahwa setiap peningkatan upah minimum akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan nilai yang sebanding, terutama bagi angkatan kerja dari usia muda. Kemudian (Schmitt J, 2013) melalui penelitiannya menemukan bahwa berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat upah minimum disebabkan oleh pekerja akan bekerja lebih keras sebagai respon atas upah minimum, sehingga menjadi saluran terhadap pengurangan penggantian tenaga kerja. Pada sisi lain (Sen A, 1997) menyatakan bahwa jika terjadi pengangguran, bukan hanya dihadapkan oleh persoalan pendapatan rendah, namun juga akan memberatkan negara, karena negara dihadapkan pada output yang rendah dan anggaran yang semestinya digunakan untuk kebutuhan fiskal, dialihkan untuk membantu keluarga pengangguran. (Burkhauser, 1989), menemukan hubungan yang lemah antara pendapatan rendah dengan kemiskinan dan semakin lemah

hubungannya seiring dengan waktu. Kemudian (Card, 2000) menyatakan bahwa upah minimum gagal mengurangi kemiskinan di Amerika.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jalan membenarkan diberlakukannya upah minimum dalam kondisi tertentu, meskipun dalam berbagai kajian empiris, upah minimum tidak memberikan efek pada kesejahteraan (kuantitatif) secara umum. Peneliti membenarkan upah minimum dikarenakan informasi atas ekspektasi harga-harga tidak dimiliki oleh pekerja, dan beberapa negara ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Pada sisi lain, upah minimum mampu memberikan efek yang baik (menyenangkan) bagi pekerja sehingga produktivitas pekerja meningkat.

5. Investasi dengan Kemiskinan

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sukirno, 2013).

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat

di kemudian hari (masa datang). Menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, uang tersebut di alihkan untuk di tanamkan bagi keuntungan masa depan. Investasi memiliki dua aspek, yaitu: konsumsi saat ini, dengan harapan dapat keuntungan di masa datang.

Dalam model pertumbuhan eksogen, permintaan barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi, sehingga output terbagi dalam konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja, dan jika sebagian pendapatan ditabung maka investasi sama dengan tabungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Anggapan ini bersifat sementara, karena jika semua pendapatan ditabung, artinya tingkat tabungan adalah 100% maka sudah barang tentu tidak ada yang dikonsumsi, sehingga perlu dilihat akumulasi modal yang optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi.

Dalam model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh (Barro & Martin, 1995), menyatakan bahwa modal terdiri atas semua input yang berbentuk fisik, seperti mesin, bangunan, jalan dan komputer. Barang-barang ini digunakan untuk produksi dan tidak untuk dikonsumsi serta digunakan untuk kegiatan produksi berikutnya. Barang-barang ini diinvestasikan oleh pihak swasta dan juga oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur jalan, bangunan, listrik, pengairan dan lainnya. Modal yang berasal dari pemerintah, yang dikenal dengan barang publik tidak dimasukkan dalam persamaan *Cobb-douglass* dari model *neo-classic*.

(Mankiw, Romer dan Weil, 1992), kemudian memasukkan modal manusia sebagai modal non fisik.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya investasi bagi kelangsungan perekonomian suatu negara, kemudian mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007. Undang-undang ini mendefinisikan ulang “penanaman modal” bagi semua investor, baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing, dan untuk pertama kalinya diterapkan pelayanan yang sama bagi semua investor. Tidak adalagi batasan 30 tahun untuk izin penanaman modal asing, juga tidak berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang investasi. Sebagai tambahan, peraturan yang baru tidak melarang perubahan modal.

Perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena: ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup; kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal; taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah. Faktor-faktor tersebut merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang. Braunstein mengatakan bahwa "*In all of these cases, income inequality is inefficient because it lessens incentives to invest and innovative*" (Braunstein, 2008).

Harrod-Domar mengemukakan suatu model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri, dimana sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa asumsi yang

digunakan dalam teori ini adalah bahwa: perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh; dalam perekonomian hanya terdapat dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada; dan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (not); kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam suatu model pertumbuhan endogen, dimana dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan asumsi bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (ekstetnalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak

perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro, 2006).

2.3 Tinjauan Empiris

Untuk membantu penyusunan teori dan model penelitian ini mengenai kemiskinan dan variabel yang mempengaruhinya, telah dirujuk beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai variabel dan metode penelitian dapat dilihat pada lampiran.